



Media Title	Investor Daily		
Head Line	Tol Trans-Sumatera Tingkatkan Industri Wisata Lokal		
Date	3 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	B1	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Tol Trans-Sumatera Tingkatkan Industri Wisata Lokal

JAKARTA – Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) sebagai bagian dari Program *Masterplan* Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mendesak untuk direalisasikan. Pemerintah pusat diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk merealisasikan pembangunan dan operasional JTTS tersebut.

“Sumatera memiliki potensi pariwisata yang indah. Potensi tersebut kurang digarap maksimal, karena keterbatasan infrastruktur,” kata Ketua Program Studi Pariwisata Universitas Indonesia, Jajang Gunawijaya kepada pers seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (2/12)

Lebih lanjut, pakar Pariwisata Budaya Indonesia ini menilai, jika jalan tol Trans-Sumatera dapat diwujudkan, wisatawan yang mengunjungi obyek wisata di Pulau Jawa dapat melanjutkan kunjungan wisatanya langsung ke Sumatera lewat jalur darat yang lebih eksotik dan menantang dibandingkan lewat udara. Demikian halnya

wisatawan luar negeri yang singgah di Singapura lewat Batam, dapat terus menikmati keberagaman hayati dan aneka budaya serta kearifan lokal yang dimiliki Sumatera.

Sependapat dengan Jajang Gunawijaya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai pembangunan infrastruktur jalan seperti JTTS akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami tentu berharap agar Presiden segera mengeluarkan perpres yang mengatur realisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu sendiri. DPR khususnya Komisi V tentu sudah menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan,” kata anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara ini.

Sutan menjelaskan, dalam melaksanakan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera sebaiknya pemerintah memberikan kepercayaan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berpengalaman dalam membangun infrastruktur yang berkualitas.

“Kami juga dorong pemerintah

untuk mencari pendanaannya agar di kemudian hari tidak memberatkan APBN. Saya kira pemerintah akan mampu untuk segera mengatasi masalah pendanaannya,” papar Sutan Batoegana.

BUMN memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat melalui *public service obligation* (PSO), sehingga tidak selamanya hanya mencari keuntungan. Dengan sendirinya, BUMN yang membangun dan mengelola jalan tol itu, nantinya mempunyai kewajiban membangun potensi yang ada di masyarakat.

Sementara itu, Jajang menambahkan, dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera termasuk JTTS sebaiknya mengutamakan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, dibandingkan harus meminta bantuan asing.

Jajang khawatir, jika belum apa-apa pihak asing sudah dilibatkan, selain akan menimbulkan resistensi dari masyarakat Sumatera, kelak dikemudian hari akan ada eksploitasi terhadap potensi yang ada di Sumatera. (b1)